

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Masyarakat dewasa ini dapat dikenali sebagai masyarakat yang berciri plural. Pluralitas masyarakat tampak dalam bentuk keberagaman suku, etnik, kelompok budaya dan golongan-golongan yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya, keyakinan dasar, kepercayaan dan keyakinan agama yang berbeda-beda. Di lain pihak, proses globalisasi menjadikan adanya pertemuan yang tidak dapat dihindari antara bentuk-bentuk pluralitas tersebut. Dalam konteks globalisasi tersebut, pandangan-pandangan tradisional dari berbagai bentuk kehidupan plural tidak lagi mencukupi untuk menjamin hidup bersama yang adil dan beradab. Dalam bidang norma moral, adanya dua dimensi tersebut menjadikan konflik moral sangat rentan terjadi dalam masyarakat. Adanya konflik moral yang tidak terselesaikan dengan tepat tentu akan mengancam integritas sosial dan identitas masyarakat.

Di dunia Barat, gerakan para feminis etik yang dipelopori Alison Jaggar adalah sebuah contoh gerakan yang memprotes legitimasi norma tradisional berkaitan dengan pengalaman perempuan.¹ Alison Jaggar menyalahkan pandangan moral tradisional yang membiarkan perempuan ditempatkan secara inferior dalam masyarakat. Alison Jaggar menilai bahwa pandangan tradisional hanya menempatkan perempuan dalam tataran ruang-ruang privat, seperti masalah

¹ *Feminist Ethics*, 4 Mei 2009, (Online), (<http://plato.stanford.edu/entries/feminism-ethics/>, diakses pada 28 April 2016)

rumah tangga, pengasuhan anak, dan sebagainya. Gerakan feminis etik ini secara umum menitikberatkan pada persamaan hak di mana norma-norma moral tradisional tidak mampu lagi untuk mengakomodasi mereka sebagai bagian masyarakat modern.

Irshad Manji, seorang feminis dari Kanada, pernah ditolak untuk mengadakan kuliah umum dan peluncuran buku oleh suatu ormas di Indonesia sebab dinilai membawa paham yang dapat merusak moral bangsa. Irshad Manji melalui bukunya *Allah, Liberty and Love*, ingin mengkritik praktek-praktek yang menyalahgunakan Al-Quran untuk melanggengkan ketidakadilan terhadap perempuan, agama minoritas, *gay* dan lesbian, anak-anak, dan lain-lain.² Pandangan ini menyatakan bahwa norma-norma tradisional tidak lagi mampu menampung kompleksitas fenomena modern khususnya tentang bagaimana beriman secara rasional dan otonom. Pandangan ini menyatakan pula suatu kemendesakan akan suatu proses untuk bersama-sama merumuskan norma yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan banyak pihak dalam masyarakat modern.

Dewasa ini, dunia sedang dilanda kebangkitan populisme. Kebangkitan populisme ini muncul dalam berbagai gerakan yang terjadi di dunia Barat maupun di Indonesia. Di negara-negara Barat, populisme hadir dalam bentuk agenda politik yang menekankan identitas dan tidak memberi ruang pada pluralisme. Di Indonesia, meskipun hadir dalam bentuk yang berbeda, populisme hadir dalam serangkaian aksi bela identitas tertentu yang berpotensi memunculkan perpecahan

² PURWANI DIYAH PRABANDARI, 18 Mei 2012. *Kata Irshad Manji Soal Homoseksualitas*, (Online), (<https://m.tempo.co/read/news/2012/05/18/173404599/kata-irshad-manji-soal-homoseksualitas>, diakses pada 26 April 2016)

dalam masyarakat plural-demokratis. Secara umum kebangkitan populisme dewasa ini senantiasa membawa berbagai bentuk pandangan identitas, misalnya dalam bidang moral dan politik, yang tidak peka terhadap keberagaman. Pandangan-pandangan identitas tersebut dapat menyebabkan berbagai konflik seperti konflik dalam bidang norma moral. Dalam permasalahan seperti ini perlulah suatu prosedur untuk memecahkan permasalahan konflik moral sehingga dapat diterima oleh semua tanpa paksaan dan ancaman terhadap identitas masing-masing.³

Konflik norma moral seperti fenomena-fenomena di atas merupakan contoh dari apa yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai krisis sosiokultural.⁴ Habermas menilai fenomena-fenomena krisis tersebut sebagai hal-hal yang menandai masyarakat dewasa ini sebagai masyarakat kapitalisme lanjut. Habermas menyatakan bahwa krisis masyarakat kapitalisme lanjut terdapat dalam bidang reproduksi kultural (komunikasi-massa) dan integrasi sosial. Krisis tersebut muncul dalam berbagai protes seperti gerakan feminisme, fundamentalisme agama, gerakan hijau, gerakan protes pajak dan sebagainya. Adapun gerakan-gerakan tersebut mengangkat tema-tema dalam wilayah sosiokultural seperti persamaan hak, kualitas hidup, perwujudan diri individu, partisipasi, hak-hak asasi, dan lain-lain.

Menurut Habermas, krisis sosiokultural dalam masyarakat kapitalisme-lanjut disebabkan oleh adanya krisis legitimasi yang berakar pada krisis motivasi. Habermas sendiri mengatakan secara eksplisit dalam *What Does a Crisis Mean*

³ FRANZ MAGNIS-SUSENO, *12 Tokoh Etika Abad ke-20*, Kanisius, Yogyakarta 2000, 234.

⁴ F. BUDI HARDIMAN, *Menuju Masyarakat Komunikatif*, Kanisius, Yogyakarta 2009, 192.

Today bahwa “Semua ini (gerakan-gerakan protes) adalah wilayah-wilayah pokok untuk menguji hipotesis kita bahwa masyarakat-masyarakat kapitalisme-lanjut terancam oleh kehancuran legitimasi”.⁵ Krisis motivasi terjadi ketika struktur-struktur normatif yang ditetapkan secara umum tidak sesuai dengan kebutuhan dari warga masyarakat. Hal ini menjadikan tidak adanya makna yang dapat mendukung suatu legitimasi. Oleh karena itu, krisis legitimasi disebabkan oleh krisis motivasi dan krisis motivasi diakibatkan oleh perubahan sistem sosiokultural yang mengikis makna.⁶

Krisis sosiokultural yang tampak dalam gerakan-gerakan protes yang ada menunjukkan adanya suatu perubahan realitas sosial. Hal ini menjadi suatu tanda dalam masyarakat dewasa ini bahwa anggapan dan penilaian lama yang dianggap biasa dapat mulai dipertanyakan lagi dan perlu dipastikan kembali. Dengan demikian, berlangsunglah sebuah proses rasionalisasi *dunia-kehidupan*⁷ berkelanjutan.⁸ Rasionalisasi *dunia-kehidupan* berarti bahwa semakin banyak bidang tidak lagi dihayati dan ditata menurut adat, tradisi atau otoritas tradisional, melainkan menurut kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dalam sebuah diskursus bersama. Dalam wilayah norma moral, Habermas menyatakan bahwa

⁵ *Ibid.*, 193.

⁶ *Ibid.*, 183.

⁷ *Dunia-kehidupan (Lebenswelt)* meliputi semua pengandaian dan anggapan yang diterima begitu saja, tanpa dipersoalkan atau diragukan. *Dunia-kehidupan* seolah-olah tersimpan dalam kebudayaan seseorang dan menjadi konteks di mana perbuatan-perbuatan komunikatif berlangsung, bahkan sering kali tanpa menyadarinya. *Dunia-kehidupan* merupakan sumber daya dan dimanfaatkan sebagai sarana komunikatif untuk mencapai persetujuan: kebudayaan, institusi-institusi, kepribadian-kepribadian. Setiap orang berkomunikasi dan bertindak dalam sebuah *dunia-kehidupan* yang merupakan suatu alam bermakna yang dimiliki bersama dengan komunitasnya, yang terdiri atas pandangan dunia, keyakinan-keyakinan moral dan nilai-nilai bersama. Segenap komunikasi mengacu pada *dunia-kehidupan* tersebut. Bdk. K. BERTENS, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris-Jerman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1995, 250.

⁸ FRANZ MAGNIS-SUSENO, *12 Tokoh Etika Abad ke-20, Op. Cit.*, 224.

moralitas manusia modern tidak dapat luput dari tuntutan khas modernitas yaitu bahwa keyakinan-keyakinan moral harus dilegitimasi secara rasional.⁹ Norma-norma moral yang dianggap tidak kontekstual akan mulai dipersoalkan legitimasinya dan membutuhkan proses untuk dipastikan kembali secara rasional.

Moralitas yang menjadi kekhasan masyarakat modern adalah bahwa setiap pandangan moral harus memiliki legitimasi yang universal. Habermas menyatakan bahwa etika diskursus adalah hal yang mendesak untuk dikembangkan guna menghadapi konflik-konflik moral. Etika ini berperan untuk mengadakan rasionalisasi praksis komunikasi menuju masyarakat yang berkomunikasi bebas hambatan dominasi.¹⁰ Etika diskursus menyediakan sebuah prosedur untuk meninjau apakah sebuah norma yang berasal dari *dunia-kehidupan* dapat berlaku secara universal atau tidak dan tidak hanya berakar dari interpretasi subjektif.¹¹ Etika diskursus menjadi suatu hal yang penting dalam masyarakat modern sebab proses rasionalisasi telah merasuk dalam berbagai bidang sedangkan tradisi dan kepercayaan lama tidak kuat lagi menjadi acuan keyakinan moral.

Karya tulis ini merupakan usaha penulis untuk mendalami bagaimana universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas. Universalisasi norma moral ini berkaitan dengan bagaimana proses penetapan suatu norma moral yang legitim di tengah masyarakat yang mempunyai ciri plural dan rasional. Dalam karya tulis ini penulis berupaya untuk memperlihatkan

⁹ Idem, *Etika Abad Kedua Puluh*, Kanisius, Yogyakarta 2006, 233.

¹⁰ F. BUDI HARDIMAN, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Op.Cit.*, 196.

¹¹ JÜRGEN HABERMAS, *Moral Consciousness and Communicative Action*, (judul asli: *Moralbewusstsein und Kommunikatives Handeln*), diterjemahkan oleh Christian Lenhardt & Weber Nicholsen, Polity Press, Cambridge 2007, 65.

universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas sebagai suatu prosedur penetapan norma moral universal untuk mencapai integrasi sosial dalam masyarakat modern.

Penulis dalam karya tulis ini menggunakan perspektif etika atau filsafat moral untuk membedah pemikiran Habermas tentang universalisasi norma moral. Etika merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang membahas tentang baik atau buruk suatu tindakan manusia. Di samping itu, etika juga membahas hal-hal fundamental lain yang berkaitan dengan tindakan manusia, seperti nilai dan norma. Karya tulis ini merupakan usaha untuk membahas tentang norma moral universal yang dirumuskan melalui proses universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas, ada dua pertanyaan yang hendak dijawab dalam skripsi ini. Pertanyaan pertama adalah “apa itu etika diskursus Jürgen Habermas?”. Pertanyaan kedua adalah “bagaimana universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus?”.

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Melalui penulisan skripsi ini penulis bermaksud untuk memperdalam pemahaman mengenai universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas. Selain itu penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan program studi strata satu (S1) di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Melalui skripsi ini, penulis berharap dapat ikut

berpartisipasi dalam usaha merefleksikan konsep universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia.

1.4. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan studi pustaka guna memahami konsep universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas. Penulis menggunakan buku-buku Jürgen Habermas yang berjudul *Moral Consciousness and Communicative Action* (1983) serta *Justification and Application* (1991) sebagai sumber pustaka utama. Di samping itu, penulis juga menggunakan beberapa buku yang ditulis para komentator Jürgen Habermas yang berbicara tentang konsep universalisasi norma moral dari perspektif etika diskursus.

1.5. SKEMA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis memakai skema penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang pemilihan judul, tujuan penulisan, rumusan masalah yang akan dijawab, metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan skema penulisan.

Bab II Riwayat Hidup dan Latar Belakang Pemikiran Filosofis Jürgen Habermas

Dalam bab ini penulis akan memaparkan riwayat hidup Jürgen Habermas yang menginspirasi untuk merefleksikan etika diskursus, pokok-pokok

pemikiran filsafat Jürgen Habermas dan beberapa karya yang telah dihasilkan. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan sekilas pemikiran beberapa filsuf yang mempengaruhi pemikiran Jürgen Habermas. Selain itu, penulis juga akan memaparkan pokok-pokok-pokok pemikiran Jürgen Habermas yang dapat menghantar pada pemikiran etika diskursus Jürgen Habermas.

Bab III Universalisasi Norma Moral dalam Teori Etika Diskursus

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tiga pokok pemikiran Jürgen Habermas. Pertama, penulis akan menjelaskan mengenai teori diskursus sebagai pemikiran dasar dari Jürgen Habermas. Kedua, penulis akan menjelaskan pemikiran Jürgen Habermas tentang etika diskursus. Ketiga, penulis akan memaparkan tentang universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas.

Bab IV Penutup

Bab ini memuat dua bagian. Pertama, penulis akan memaparkan relevansi konsep universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia yang memiliki ciri plural. Kedua, penulis akan memaparkan kesimpulan dari pembahasan mengenai konsep universalisasi norma moral dalam teori etika diskursus Jürgen Habermas.